The Urgency to Redefine ASEAN’s Security Concept: A Critical Analysis of the Covert Threats of *Neo Chola* and *Neo Naga (Neo Dragon)*

Nuruddin Al Akbar

Departement of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada

Nuruddin.alakbar@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to explore a blind spot on the security concept held by ASEAN. ASEAN’s security concept is reflected in the establishment of ASEAN political security community, in which this institution tends to look at the security concept in an non-traditional manner and tends to neglect the traditional security concept. Such a tendency for a non-traditional security concept manifests clearly in the definition of security threats such as counter-terrorism efforts, drug eradication cooperation and issues on poverty. Based on the definition of threats, it is obvious that ASEAN’s security concept does not consider a state as a threat, as the traditional security concept does.

This research tries to explore the real threats facing ASEAN which go unnoticed because of the security definition which it adopts. Such threats manifest in the ambition of two Asian countries, namely China and India, which are competing extending the influence internationally, including in Southeast Asia. This competition between the two countries in the ASEAN region may trigger a variety of new problems such as increasing regional instability and decreasing cohesiveness. If such phenomena do occur, it is ASEAN itself which will be disadvantaged due to the resulting insecurity.

There are two important discussions which this research tries to elaborate. First, it tries to elaborate the real threats from China and India which constitute the blind spot on ASEAN’s security concept. The discussion on this section also includes tracking the history of the imperial ambitions of the two countries in the past against the Southeast Asian region. Second, it provides an offer to change (redefine) ASEAN’s security concept which remains be based on the value peculiar to ASEAN, which is dialogue. This peculiarity is important to maintain in order that ASEAN does not do what NATO has done which preferred the military option to dialogue.

**Keywords:** India, China, Traditional Security, Non Traditional Security, ASEAN Political Security Community

**Theme:** Harmony In Diversity: Building ASEAN Community 2015

# EXORDIUM: Kontradiksi integrasi dan disintegrasi KEAMANAN asean

Gagasan untuk menyatukan berbagai negara yang tergabung dalam ASEAN secara lebih erat termanifestasi dengan dikemukakannya ide Komunitas ASEAN (ASEAN Community). Ide tersebut menunjukkan adanya keinginan kuat dari para negara anggota ASEAN untuk mentransformasikan lambaga yang selama ini menaungi mereka sejak tahun 1967, menjadi sebuah lembaga yang lebih solid dan mengikat. Tujuan dari transformasi tersebut dapat dikatakan ingin mengikuti jejak Uni Eropa (EU), yang dianggap ASEAN menjadi *role model* ideal karena berhasil memperkuat persatuan diantara negara Eropa[[1]](#endnote-1).

Sebagai upaya untuk mewujudkan imaji mengenai integrasi ASEAN yang ideal layaknya Uni Eropa, dirancanglah tiga pilar kerjasama yang dapat dikatakan sebagai “soko guru” atau pilar integrasi ASEAN. Tiga “soko guru” tersebut ialah *ASEAN Political Security Community* (APSC), *ASEAN Economic Community* (AEC), dan *ASEAN Social Cultural Community* (ASCC). Dari tiga “soko guru” tersebut dapat dikatakan yang menjadi sentral perhatian negara anggota ASEAN di era kontemporer ini ialah *ASEAN Economic Community* (AEC), yang berpijak pada imaji integrasi ekonomi kawasan ASEAN melalui strategi penciptaan pasar bersama ASEAN. Intergasi ekonomi diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendorong kemakmuran diantara negara ASEAN[[2]](#endnote-2). Maka tidak mengherankan ketika berbagai negara ASEAN berbedah diri untuk menyambut era integrasi ekonomi tersebut, termasuk Indonesia.

Sebuah kenyataan penting yang patut menjadi perhatian mengenai upaya integrasi ekonomi yang coba diwujdukan oleh ASEAN, bahwa sejatinya upaya tersebut tidak dapat dipisahkan dari persoalan keamanan (security). Sebagaimana diyakini oleh para ahli keamanan dan praktisi pembangunan, ada keterkaitan erat antara masalah keamanan dan pembangunan (ekonomi). Relasi tersebut dapat digambarkan sebgai berikut: tidak mungkin dilakukan pembangunan tanpa adanya jaminan kemanan. Dengan kata lain keamanan adalah prasyarat dilangsungkannya pembangunan[[3]](#endnote-3). Sehingga untuk mewujudkan *ASEAN Economic Community* (AEC) maka di saat yang sama *ASEAN Political Security Community* (APSC) juga harus dijalankan secara maksimal agar proses integrasi ekonomi tidak terganggu oleh berbagai jenis ancaman keamanan yang potensial muncul.

Sebuah keanehan terjadi ketika mencermati secara kritis bagaimana ancaman keamanan ditangani oleh ASEAN dalam era kontemporer ini. Dapat dikatakan ASEAN terlihat begitu bersemangat dalam bersinergi guna mengatasi jenis ancaman keamanan non tradisional, namun lemah dalam bersinegri dalam mengatasi jenis ancaman kemanan tradisional, secara khusus dalam bentuk ancaman negara asing (non ASEAN)[[4]](#endnote-4). Sebagai contoh menarik dapat disimak dari respon ASEAN terhadap badai tropis yang terjadi di wilayah Myamnar pada tahun 2008. Tercatat badai tersebut menewaskan lebih dari 100.000 warga dan menghancurkan berbagai tempat tinggal dan berbagai fasilitas publik di sejumlah wilayah yang dilaluinya tanpa menyisakan satu bangunanpun tegak berdiri[[5]](#endnote-5). ASEAN bertindak cepat paska bencana badai terjadi. Tepatnya pada tanggal 5 Mei 2008, sekitar 3 hari paska bencana terjadi, ASEAN melalui sektetariatnya mengambil langkah proaktif untuk segera menggalang kekuatan ASEAN dan dunia internasional guna membantu negara Myanmar[[6]](#endnote-6). Tercatat *funding* segera terbentuk melalui aksi cepat tanggap tersebut dan berhasil mengatongi dana kemanusiaaan sebesar 100. 000 dolar AS dari negara Jepang. Selain Jepang, ASEAN juga segera menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga interasional seperti World Bank untuk turut serta mengulurkan tangannya membantu Myanmar[[7]](#endnote-7). Singkat cerita, ASEAN sukses menghubungkan kekuatan yang dimiliki ASEAN secara internal, pemerintah Myamnar, dan komunitas internasional di luar ASEAN untuk bersinergi membantu Myamnar menghadapi bencana alam yang melanda wilayahnya[[8]](#endnote-8). Dari perspektif keamanan, sangat jelas ASEAN mendulang kesuksesan besar dalam menanggulangi jenis ancaman kemanan non tradisional.

Situasi yang berbeda terjadi ketika ASEAN berhadapan dengan jenis ancaman tradisional, yakni kekuatan militer dari negara asing (non ASEAN). Kecenderungan negatif terlihat jelas dengan mencermati salah satu gejolak politik yang hingga saat ini belum usai melanda kawasan tersebut, yakni konflik laut China selatan. Konflik tersebut melibatkan negara asing yakni China[[9]](#endnote-9), yang berupaya melebarkan pengaruhnya di wilayah tersebut. Faktanya hingga hari ini manuver China tidak dapat direspon secara memuaskan oleh ASEAN. Sebuah kondisi yang bertolak belakang dengan kapasitas menakjubkan ASEAN dalam menanggulangi bancana alam di Myamnar. Satu-satunya langkah bersama yang diambil ASEAN ialah dengan merratifikasi *Declaration On The Conduct Of Parties In The South China Sea* (DoC) bersama China[[10]](#endnote-10). Sangat disayangkan DoC cenderung problematik karena faktanya sejak diratifikasinya dokumen tersebut hingga saat ini, situasi konflik tidak mereda, bahkan justru bertambah panas. Bukti nyata dari kondisi konflik yang makin panas dapat dicermati dari ucapan Surin Pitsuwan –yang menjabat sebagai sekjen ASEAN- di tahun 2012. Ia menyatakan bahwa Laut China Selatan dapat menjadi semacam “Palestina baru” di wilayah Asia[[11]](#endnote-11). Dengan kata lain selama kurun waktu 10 tahun paska deklarasi, tidak ada kemajuan berarti yang dapat dilakukan ASEAN -dengan berpayung DoC- guna menciptakan keamanan. Kenyataan pahit tersebut memang masuk akal karena jika dicermati secara lebih kritis, DoC cenderung cacat karena sifatnya yang tidak mengikat. Kecacatan ini misalnya dapat dicermati pada tiadanya ketentuan sanksi yang dijatuhkan jika ada pihak yang melanggar kesepakatan[[12]](#endnote-12). Situasi semakin buruk ketika secara realitas di kalangan internal ASEAN sendiri yang notebene menjadi korban ambisi politik militer China justru tidak munjukan adanya kekompakan untuk menjalankan DoC. Salah satunya tercermin dari pernyataan menteri pertahanan Malaysia, Hishamuddin Hussein di tahun 2013. Hussein menyatakan: “*Just because you have enemies, doesn’t mean your enemies are my enemies[[13]](#endnote-13)*” Sebuah ungkapan yang secara khusus menyindir sejumlah negara ASEAN lain seperti Vitenam dan Filipina yang secara tegas berupaya melawan ekspansi ke wilayah Asia tenggara. Dari pernyataan Hussein tergambar bahwa masalah China bukan urusan Malaysia, melainkan urusan negara lain yang merasa berkonflik dengan China. Mencermati realitas tersebut kiranya tepat untuk menyatakan DoC hanyalah sekedar formalitas belaka tanpa ada kontribusi nyata bagi penciptaan stabilitas keamanan di wilayah ASEAN.

Realitas menyedihkan yang terjadi di laut China selatan secara jelas menunjukkan sebuah kontradiksi parah keamanan ASEAN, dimana di satu sisi begitu cemerlang menghadapi ancaman keamanan yang sifatnya non tradisional, namun di saat yang sama gagal dalam menghadapi ancaman kemanan yang sifatnya tradisional, padahal dua ancaman tersebut sama-sama membahayakan ASEAN. Mengapa kontradiksi tersebut dapat terjadi tentunya menjadi sebuah pertanyaan penting. Apakah karena ASEAN tidak memiliki kapasitas yang memadahi dalam menghadapi China mengingat negara tersebut tengah bangkit baik secara ekonomi maupun militer? Ataukah ada yang salah pada diri ASEAN itu sendiri sehingga tidak mampu mendayagunakan sumber daya yang dimikikinya untuk menghadang China? Artikel ini berupaya menjawab mengapa terjadi kontradiksi tersebut. Artikel ini berpijak pada pandangan bahwa sejatinya ASEAN tidaklah lemah dari sisi sumber daya yang dimiliki untuk menghadang ambisi ekspansi militer-politik China ke Asia Tenggara. Problem sesungguhnya dari ketidakmampuan ASEAN menghadapi China terletak pada adanya titik buta pada konsep keamanan ASEAN menegasikan jenis ancaman keamanan tradisional, yakni kekuatan militer negara asing. Dengan kondisi semacam itu ASEAN pada hakikatnya berada dalam kondisi rentan karena tidak bisa mendeteksi bahaya besar yang ada di dekatnya.

Artikel ini berupaya menjelaskan mengapa titik buta tersebut dapat tercipta, sekaligus memberikan tawaran solusi yang dapat diambil untuk membenahi titik buta dalam konsep keamanan ASEAN tersebut. Namun sebelumnya artikel ini akan membahas lebih rinci mengenai ancaman yang potensial ditimbulkan dari kepada ASEAN dari sejumlah negara asing di sekeliling wilayah tersebut. Pembahasan ini menjadi penting sebagai upaya penyadaran bahwa ada bahaya besar di luar sana yang harus segera ditanggulangi.

Terkait dengan pembahasan ancaman negara asing, artikel ini tidak hanya menyoroti China teapi juga India, sebuah negara Asia lain yang juga berbatasan dengan Asia Tenggara. Sebagaimana China, India juga menyimpan potensi ancaman bagi ASEAN di kemudian hari jika tidak ditanggulangi dengan baik. Terkait dengan metode yang digunakan dalam artikel ini sepenuhnya menyandarkan pada studi pustaka, yakni mengumpulkan berbagai referensi yang relevan dengan tujuan penelitian.

1. **MENGUAK ANCAMAN NEO CHOLA DAN NEO NAGA TERHADAP KEAMANAN ASEAN**

Dikarenakan ancaman China relatif lebih terbuka di mata ASEAN, ditunjukkan dengan respon ASEAN melalui DoC, maka pembahasan akan dimulai dengan pemaparan mengenai kasus China kemudian disusul dengan India. China mengalami transformasi besar yang terjadi dalam waktu singkat paska kematian Mao Zedong. Pemimpin China yang baru Deng Xiaoping berupaya merancang kebijakan baru restrukturisasi ekonomi mengikuti model pasar[[14]](#endnote-14). Diharapkan dengan transformasi di bidang ekonomi akan mempercepat pembangunan negeri tersebut dan mengejar ketertinggalannya dengan negara lain. Ambisi Deng dapat dikatakan relatif sukses, dimana dalam waktu singkat China telah menjelma menjadi raksasa ekonomi baru dunia[[15]](#endnote-15).

Kebangkitan ekonomi China secara otomatis menambah pemasukan pemerintah untuk mengembangkan pembangunan di berbagai bidang, termasuk militer. potensi mengubah tata dunia paska perang dingin yang hanya menyisakan satu negara superpower saja yakni AS. Kebangkitan ekonomi dan militer China diperkirakan mampu mengubah tata dunia paska perang dingin, dimana China potensial muncul sebagai rival AS di masa depan[[16]](#endnote-16). Pertanyaan yang muncul ketika China tengah bertansformasi menjadi salah satu negara besar di dunia akankah ia akan mengikuti jejak AS yang dengan pongahnya mengaku sebagi “polisi dunia” dan menghukum pihak yang tidak disukainya secara sewenang wenang. Iraq menjadi salah satu korban invasi negara superpower tersebut di tahun 2003 karena berbagai tuduhan palsu?[[17]](#endnote-17) Ataukah China mampu meruntuhkan citra negatif tersebut dimana kebangkitannya justru menjadi berkah bagi bangsa-bangsa lain di dunia sebagaimana yang digembar-gemborkan secara lantang oleh China sendiri[[18]](#endnote-18)?

Artikel ini berpandangan bahwa China sangat potensial muncul sebagai ancaman serius, terkhusus di wilayah Asia Tenggara, jika tidak ditanggulangi dengan baik. Guna memahami mengapa China dapat menjadi ancaman serius dapat ditilik dari konsep Sinosentrisme (Sinocentrism)[[19]](#endnote-19). Konsep Sinosentrisme berasaskan pada imaji bahwasanya China merupakan satu-satunya mengara beradab di dunia, sedangkan negara-negara lain di sekitarnya berstatus tidak beradab. Sebagai konsekuensi dari cara berfikir tersebut, tata dunia ala China terbagi menjadi 2 bagian. Bagian petama yakni China dianggap sebagai negara pusat dunia, sementara negara-negara sekelilingnya diposisikan sebagai subordinat China (*vassal state*). Relasi yang terbangun antara China dan negara lain dalam konsepsi ini sejatinya berbasis hierarkis, dimana negara lain wajib menyerahkan semacam upeti sebagai bukti ketundukan mereka[[20]](#endnote-20). Sebagai balasannya negara tersebut dapat membuka misi perdagangan dengan negara China[[21]](#endnote-21) dan akan mendapat jaminan keamanan[[22]](#endnote-22) dari China[[23]](#endnote-23). Model tata dunia berbasis siklus pertukaran (*exchange*) antara negara pusat dan negara subordinat jelas menjamin keamanan nasional China. Siklus tersebut bermula dari upeti yang masuk dari negara subordinat ke negara induk. Upeti segera dimanfaatkan untuk semakin memperkuat negara induk. Semakin menguatnya negara induk secara otomatis mengokohkan cengkramannya di wilayah subordinat baik melalui perdagangan (ekonomi) atau militer.

Perlu ditambahkan bahwa konsep subordinat China sendiri berbeda dalam derajat tertentu dari kolonialisme Barat. Jika Barat melakukan pendudukan wilayah secara langsung dengan membangun koloni-koloni di wilayah jajahannya, cara yang sangat berbeda diterapkan China. China tidak pernah melakukan penguasaan wilayah secara langsung melalui pendudukan. Stategi yang ditempuh mereka adalah penguasaan tidak langsung, dimana China berupaya memposisikan dirinya sebagai sosok yang “ramah” bahkan “penolong” bagi negara subordinat, seperti memberikan mereka komoditas yang dibutuhkan dan perlindungan dari ancaman serangan asing. Salah satu implikasi mengejutkan dari strategi tersebut termanifestasi jelas dari dikap negara subordinat terhadap negara induk. Status mereka sebagai negara subordinat –melalui pengesahan resmi oleh China- justru dianggap sebuah kebanggan tersendiri bagi negara tersebut[[24]](#endnote-24). Fenomena mengejutkan tersebut menjadikan layak untuk menyatakan bahwa Sinosentrisme relatif sama dengan kolonialisme Barat dalam upayanya menginisiasi strategi *civilizing mission[[25]](#endnote-25)*. Sehingga kehadiran mereka bukan dianggap sebagai ancaman tetapi sebagai “pencerah’, “pembebas”, atau berbagai gelar lain yang maknanya sama.

Konsepsi Sinosentrisme ini dapat dikatakan merupakan konsep yang secara turun temurun dipegang oleh China selama berabad-abad[[26]](#endnote-26) dan baru mulai melemah paska masuknya kekuatan Barat ke wilayah Asia, dan akhirnya sirna karena digantikan oleh model kolonialisme Barat[[27]](#endnote-27). Kolonialisme Barat secara fundamental mengubah tata dunia yang telah dibentuk oleh China. Perubahan tata dunia tersebut tentunya juga mengancam konsep kemanan nasional China yang banyak menggantungkan penguatan kerajaanya dari upeti negara subordinat. Bisa dibayangkan China yang sebelumnya menempati posisi negara pusat dan satu satunya negara beradab, paska kolonialisme Barat takluk menjadi subordinat Barat. Lebih menyedihkan lagi di mata China, kini negaranya lebih lemah daripada “mantan subordinatnya” seperti Jepang. Bahkan Jepang tercatat mampu menjajah negara tersebut hingga akhir perang dunia II. Selain dipermalukan oleh penjajahan Jepang, secara otomatis negara subordinat yang dahulunya memasok upeti ke China sehingga makin memperkuat keamanan nasional negara tersebut hilang. Sebagai gantinya negara mantan subordinat memasok upeti dan berbagai sumber dayanya ke kolonialis Barat sebagai “tuan baru” mereka.

Paska kolonialisme Barat berakhir dan berkembangnya China menjadi salah satu kekuatan dunia, tentunya muncul pertanyaan apakah China modern saat ini kembali ingin menerapkan sistem tata dunia lama mereka di tengah zaman yang telah berubah? Jawaban dari pertanyaan ini adalah ya, tetapi tentunya dengan sejumlah perbaikan agar sesuai dengan kondisi zaman dan keadaan China kontemporer[[28]](#endnote-28). Poin penting yang masih dipertahankan dalam dokrin neo-sinosentris ialah pembilahan dunia menjadi dua bagian yakni China (negara pusat) dan negara lain (suborinat). Secara detail bentuk pembilahan tersebut ialah: *pertama.* Konsep negara subordinat. Sebagaimana di masa lalu, negara subordinat penting untuk menjamin penguatan negara pusat melalui sistem pertukaran (*exchange*). Sistem yang sebangun juga diterapkan oleh China di era kontemporer dengan tujuan memastikan pasokan bahan baku industri yang sangat dibutuhkan negara tersebut untuk terus bertransformasi sebagai negara maju. Tercatat China berupaya membangun sistem pertukaran dengan negara di Asia Tengah[[29]](#endnote-29), sebagai patron baru dari “tuan lama” mereka, Russia[[30]](#endnote-30).

*Kedua*. Konsep negara pusat. Imaji China sebagai negara pusat coba dibangun ulang seiring keberhasilan penciptaan kembali negara subordinat. Transformasi ekonomi dan militer China merupakan salah satu langkah untuk mengembalikan kapasitas China sebagai negara pusat atau dalam istilah modern ialah negara superpower. Langkah lain yang juga ditempuh China ialah mencoba menyatukan kembali wilayah-wilayah “hilang” untuk memastikan kesatuan utuh negara pusat.

Berbeda dengan wilayah subordinat yang tidak dikontrol langsung oleh China, wilayah “hilang” tersebut merupakan bagian integral dari China, sehingga harus dikontrol secara langsung oleh rezim Beijing. Cara apapun akan dilakukan China untuk memastikan kontrol kembali atas wilayah tersebut, termasuk dengan cara-cara militer. Walaupun tentunya China masih menggunakan rasionalitasnya untuk bersikap menyesuaikan keadaan yang ada. Ketika situasi tidak mendukung, maka ia akan melunakkan dirinya. Namun jika situasi mendukung, maka ia akan menggunakan segala cara untuk mendapatkannya, walaupun dengan jalan militer.

Contoh nyata dari dua strategi “lunak” dan “keras” China dapat ditelusuri dari sikap negara tersebut terhadap Taiwan dan Tibet[[31]](#endnote-31). China menghadapi Tibet dengan jalan “keras” dimana Tibet dianeksasi secara paksa oleh China dan ahirnya menjadi wilayah resmi China hingga hari ini. Berbeda dengan Tibet, Taiwan mendapatkan penjagaan dari AS, sehingga China tidak dapat menggunakan jalur militer untuk mendapatkan Taiwan[[32]](#endnote-32). China lebih memilih cara diplomatis untuk menguasai Taiwan yakni memalui kebijakan satu China (*one China policy*). Dapat dikatakan kebijakan ini sukses menganulir dukungan internasional pada Taiwan sebagai negara merdeka. Walaupun sebagian besar negara tetap mengakuinya sebagai bagian terpisah dari China dan melakukan hubungan secara mandiri dengan negara tersebut di berbagai bidang[[33]](#endnote-33).

Kasus Tibet dan Taiwan sejatinya perlu menjadi renungan serius bagi ASEAN, karena sejumlah wilayah di laut China Selatan diklam oleh China sebagai bagian dari wilayahnya yang “hilang”[[34]](#endnote-34). Sebagaimana dibahas sebelumnya, wilayah yang “hilang” di mata China merupakan bagian tidak terpisahkan dari negara tengah, sehingga haruslah dikontrol secara mutlak oleh China. Tidak ada ruang untuk menegosiasikan pemerintahan tidak langsung seperti model negara subordinat. China akan mendayagunakan segala cara untuk mendapatkan wilayah tersebut kembali ke pangkuannya[[35]](#endnote-35). Jika negara ASEAN meremehkan atau bahkan tidak menyadari ancaman tersebut, maka dengan mudah China akan leluasa mempergunakan segala cara untuk mendapatkannya. Satu-satunya langkah yang dapat diambil oleh negara ASEAN adalah menyadari bahaya tersebut dan mengerahkan segala daya yang dimilikinya untuk memastikan China urung untuk merealisasaikan klaimnya di wilayah Asia Tenggara. Sebagaimana Taiwan dengan bantuan AS mampu menurunkan ambisi China untuk menguasai negara tersebut secara total.

Jika China memang terbukti menjadi ancaman serius bagi ASEAN lalu bagaimana dengan India? Apakah negara tersebut memiliki ambisi serupa dengan China? Jawaban dari pertanyaan itu adalah ya. India memiliki imaji yang sama sebagaimana China yang merasa negararanyalah yang pantas menduduki posisi penting diantara negara-negara yang lain. Secara khusus India merasa negaranya pantas untuk menjadi pimpinan negara dunia ketiga. Impian India tersebut tentunya semakin menguat seiring dengan transformasi negara tersebut menjadi salah satu kekuatan dunia. Transformasi India ditandai dengan penguatan ekonomi dan militer negara tersebut. Tercatat India merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi paling cepat di dunia. India juga mampu mengukuhkan dirinya di bidang militer setelah sukses memiliki senjata nuklir di tahun 1998[[36]](#endnote-36). Kemajuan India tersebut pada akhirnya membuat India memunculkan strategi *Look East Policy*, dengan salah satu tujuan utamanya adalah Asia Tenggara. Melalui strategi tersebut, India ingin mengukuhkan kedudukannya sebagai pemain regional. Pilihan India pada Asia Tenggara sangatlah beralasan, karena secara geografis berbatasan langsung dengan Asia Tenggara[[37]](#endnote-37). Terlebih lagi secara politik kawasan tersebut juga sedang dilirik oleh rival India, yakni China. Faktor China tentu menambah semangat India untuk bersaing dengan rivalnya di kawasan tersebut[[38]](#endnote-38). Dua alasan utama inlah –tanpa membatasi adanya alasan lain- yang membuat India begitu tertarik untuk mendekati negara anggota ASEAN.

Manuver yang dilakukan Inda lewat *Look East policy* nya dapat dikatakan mampu menarik hati para pemimpin negara ASEAN. Sebagai contoh pada era 80an, Indonesia dan Malaysia merupakan contoh negara ASEAN yang menaruh curiga kepada kebijakan ekspansi India ke wilayah Asia Tenggara. Akan tetapi kecurigaan segera sirna dengan sejumlah manuver India yang dijalankan kepada kedua negara tersebut. Sikap Malaysia kepada India, misalnya, berubah drastis di tahun 1991. Mahathir Muhammad, yang saat itu menjabat sebagai perdana menteri Malaysia membuat pengakuan mengejutkan bahwa dirinya tidak lagi merasa India sebagai ancaman[[39]](#endnote-39). Sejumlah pemimpin negara ASEAN bahkan berharap banyak kepada India untuk menjadi pengimbang kekuatan di ASEAN untuk menghadapi ekspansi China. Sikap semacam ini misalnya disampaikan oleh Lee Kuan Yew[[40]](#endnote-40).

Upaya India untuk meyakinkan ASEAN bahwa negaranya bukanlah ancaman memang patut diapresiasi. Tentu saja segala bentuk relasi dengan negara asing yang sifatnya positif -baik dengan India ataupun China- haruslah disambut oleh ASEAN. Namun ada rambu-rambu penting yang harus selalu diingat oleh ASEAN agar tetap dalam keadaan wakpada. Rambu-rambu tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Soekarno dengan slogannya yang terkenal ialah “jasmerah”, yang artinya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah seharusnya menajdi pijak penting bagi negara di ASEAN –termasuk Indonesia- dalam menyikapi hubungannya dengan India yang sampai saat ini terkesan tidak bermasalah sama sekali. Sejarah memberikan pelajaran penting mengenai perubahan sikap mengejutkan India saat itu –yang diperintah kerajaan Chola- dengan serangan mendadaknya ke wilayah Asia tenggara. Sasaran invasi kerajaan Chola ialah Sriwijaya (saat ini masuk wilayah Indonesia) dan wilayah Kedah (saat ini masuk wilayah Malaysia)[[41]](#endnote-41).

Sebelumnya relasi yang terjalin antara Chola dan Sriwijaya sangatlah harmonis, ditunjukkan salah satunya dengan kerjasama membangun kuil Buddha[[42]](#endnote-42). Alasan serangan sendiri masih misterius[[43]](#endnote-43), akan tetapi proses merancang serangan tersebut dan dampak yang dihasilkannya sangat mengejutkan. Mengenai proses merancang serangan,dapat dikatakan sengatlah terencana dengan baik, terkhusus dari sisi intelejen. Perlu diketahui untuk melakukan serangan jitu yang mematikan, tentunya membutuhkan gambaran detail tentang kawasan musuh. Dapat disimpulkan intelejen Chola telah menyelidiki Sriwijaya secara seksama sejak era perdamaian antara kedua negara[[44]](#endnote-44). Tentunya pada saat itu Sriwijaya tidak pernah menduga ada rencana besar invasi Chola ke wilayahnya. Terkait dampak dari serangan Chola sendiri secara fundamental merombak arsitektur kekuasaan di wilayah tersebut. Chola menjadi penguasa utama lajur perdagangan langsung yang menghubungkan India selatan dengan China. Di sisi lain Sriwijaya melemah, hingga akhirnya mengalami keruntuhan[[45]](#endnote-45).

Fakta sejarah diatas menunjukkan bahwa sikap waspada –bukan memutus hubungan- harus ditunjukkan ASEAN terhadap India. Terlebih lagi secara tegas India menganggap Asia Tenggara sebagai “jantung” dari *Look East Policy* nya. Implikasinya, India tidak akan membiarkan wilayah tersebut lepas dari dominasinya. Terlebih lagi dengan adanya rival India, yakni China, di kawasan tersebut. India dapat mempergunakan sejumlah negara di Asia Tenggara sebagai “bidak caturnya” untuk melawan China[[46]](#endnote-46). Jika kekhawatiran tersebut benar-benar terjadi maka pada hakikatnya negara ASEAN tidak lagi menjadi tuan rumah di wilayah sendiri, tetapi mereka justru menjadi korban dari ambisi dua negara yang tengah bertansformasi menjadi kekuatan besar dunia. Dengan kata lain kawasan ASEAN terancam menjadi lahan baru “perang dingin” dengan pemain utama India dan China.

1. **REDEFINISI KEAMANAN ASEAN SEBAGAI CARA MENGHADANG ANCAMAN NEO CHOLA DAN NEO NAGA**

 Penjelasan di atas menunjukkan potensi ancaman yang besar dari India dan China terhadap ASEAN. Tentunya ancaman tersebut haruslah ditanggulangi sedini mungkin agar ancaman keamanan tersebut tidak membesar dari waktu ke waktu. Solusi yang ditawarkan oleh artikel ini ialah membenahi konsep keamanan ASEAN yang cenderung menegasikan jenis ancaman tradisional. Sebelum merancang solusi, tentunya diperlukan pemahaman yang baik mengenai apa penyebab kecenderungan penegasian ancaman kemanan tradisonal tersebut oleh ASEAN sehingga dapat dicarikan solusi yang jitu.

Sejatinya titik buta konsep kemanan ASEAN tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang penciptaan ASEAN itu sendiri. Setidaknya ada dua fase sejarah yang mempengaruhi eksistensi titik buta konsep keamanan yakni *pertama*, fase pra penciptaan ASEAN. *Kedua*, fase paska penciptaan ASEAN. Terkait fase pertama, sejatinya masih dapat dipilah menjadi dua bagian lagi, yakni 1.) Konteks perang dingin dan gagasan nonblok. ASEAN didirikan dalam konteks perlawanan dunia ketiga yang menolak wilayahnya menjadi ajang perebutan kuasa antara dua Negara superpower saat itu yakni Uni Soviet dan AS. Sebagai upaya perlawanan, negara dunia ketiga -termasuk negara di Asia Tenggara- mendeklarasikan kenetralannya dalam sebuah perhelatan spektakuler bernama Konferensi Asia Afrika (KAA). Secara otomatis oposisi dunia ketiga kepada eksistensi dua blok negara superpower tersebut juga berimplikasi pada cara pandang mereka melihat dua pakta kemanan yang terbentuk pada saat itu yakni NATO dan Pakta Warsawa. Padahal kedua organisasi tersebut dianggap sebagai representasi paling nyata dari cara berfikir model keamanan tradisional, yang menempatkan negara asing sebagai ancaman kemanan yang serius. Dunia ketiga –termasuk ASEAN- disuguhi oleh sepak terjang dua organisasi tersebut yang saling berebut kuasa di berbagai penjuru dunia. Hasil dari pertempuran tersebut relatif negatif di mata dunia, diantaranya ialah ketakutan akan pecah perang nuklir. Selain perang nuklir secara nyata pertikaian kedua blok memicu terjadinya perang saudara atau perang antar negara yang disokong masing-masing blok. Gambaran tersebut tentunya menghasilkan trauma tersendiri di kalangan negara ASEAN bahwa konsepsi kemanan tradisional pasti akan berujung dengan berbagai malapetaka[[47]](#endnote-47). Terlebih lagi Asia Tenggara secara khusus menyaksikan perluasan perang dari dua blok dengan didirikannya *South East Asia Treaty Organization* (SEATO), yang notabene termasuk bagian dari blok AS[[48]](#endnote-48). 2.) Terjadinya pertentangan diantara negara pendiri ASEAN. Sebelum ASEAN berdiri, sejumlah negara yang menjadi *founding father* ASEAN terlibat konflik antara satu dengan yang lain. Konflik tersebut didominasi penentangan terhadap berdirinya Federasi Malaysia oleh Indonesia dan Filipina. Dapat dikatakan konflik antara negara pendiri ASEAN juga mewarnai konsep keamanan ASEAN. Dikarenakan tidak ingin mengulang kembali perselisihan dan konflik yang cenderung merugikan semua pihak yang berikai, maka penanganan konflik internal antar negara ASEAN mendominasi gagasan keamanan lembaga tersebut di kemudian hari. Tentu saja cara berfikir ini tidak salah, bahkan sangat kontekstual dengan keadaan Asia Tenggara. Hanya saja salah satu implikasi negatif yang muncul dari cara berfikir semacam itu ialah membuat cara pandang keamanan ASEAN cenderung “*inward looking*”, yakni meyakini masalah kemanan secara umum berasal dari diri negara ASEAN itu sendiri, bukan berasal dari luar negara ASEAN[[49]](#endnote-49).

Paska pendirian ASEAN kebanyakan masalah keamanan yang dihadapi oleh negara anggota ASEAN semakin memperkuat gaya berfikir “*inward looking*”. Ancaman tersebut misalnya berbentuk aksi separatis atau perang saudara yang melanda sejumlah Negara ASEAN. Sebut saja kelompok Moro di Filipina yang berupaya memperjuangkan kemerdekannya dari kekuasaan Filipina, perang saudara di Kamboja, atau konflik antar negara di Asia tenggara. Salah satu contohnya yang masih terjadi dalam era kontemporer ialah konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja dikarenakan masalah sengketa perbatasan[[50]](#endnote-50). ASEAN sendiri melalui tangan Indonesia berhasil membujuk kedua pihak untuk duduk dalam meja perundingan[[51]](#endnote-51). Jika konflik antar negara ASEAN dapat digolongkan sebagai jenis ancaman tradisional[[52]](#endnote-52), maka ancaman model ini tetap bersifat “*inward looking*” bukan “*outward looking*”.

Jejak historis itulah yang memberikan penjelasan mengapa di dalam imaji *ASEAN* *Political Security Community*, jenis ancaman keamanan tradisional yang “*outward looking*” relatif tidak terdefinisikan. Jejak historis itu pula yang menjelaskan mengapa persoalan penting sepeeri konflik laut China Selatan yang melibatkan China seakan dipandang sebelah mata oleh sejumlah negara ASEAN. Istilahnya dalam “kamus keamanan ASEAN”, tidak ada bab khusus mengenai potensi ancaman yang datang dari negara luar ASEAN. Sehingga meskipun secara realitas China dan India jelas menjadi ancaman, namun secara ketiadaan “bab khusus” yang dimaksud, maka potensi ancaman India dan China secara sadar ataupun tidak cenderung disingkirkan dalam logika berfikir *ASEAN* *Political Security Community*.

Solusi dari permasalahan ini sangatlah jelas yakni melakukan “revisi kamus keamanan ASEAN” dengan memasukkan “bab baru” mengenai jenis ancaman kemanan yang potensial datang dari negara asing di luar ASEAN. Solusi yang dapat ditempuh secara operasional ialah: *Pertama*, penyadaran akan bahaya besar yang potensial ditimbulkan dari negara asing –dalam hal ini China dan India- sehingga negara ASEAN tergerak hatinya untuk mendefinsikan ulang konsepsi keamanan mereka. *Kedua*, pada saat bersamaan haruslah diupayakan penghapusan trauma masa lalu bahwa integrasi konsep kemanan tradisional akan berakhir layaknya NATO, Pakta Warsawa, atau SEATO. Bagimana cara menghapus trauma ini? Jawabannya terletak pada proses pewacanaan bahwa konsepsi keamanan bukan sebuah entitas yang statis tetapi dinamis. Dinamis dalam artian terbuka untuk menampung perubahan jika diperlukan[[53]](#endnote-53). Perubahan dapat dilakukan pada sejumlah sisi, mulai dari perubahan di sisi *sumber ancaman kemanan*. Sebagai contoh pada sebuah konsep keamanan di sebuah negara dunia ketiga, sebelumnya hanya memandang *sumber ancaman* berasal dari ambisi militer negara asing. Konsep keamanan ini dapat direvisi dengan menambahkan jenis ancaman kemanan yang berasal dari sumber-sumber non militer, seperti bencana alam atau kemiskinan[[54]](#endnote-54). Perubahan juga dapat dilakukan pada sisi *cara menaggulangi ancaman tersebut*. Misal dalam sebuah negara dunia ketiga dahulu ancaman murni ditanggulangi dengan opsi militer[[55]](#endnote-55). Dikarenakan negara tersebut merevisi konsep kemanannya dengan mengintegrasikan jenis ancaman non tradisional, maka opsi penanggulangan diperbaharui, misal dengan pembangunan[[56]](#endnote-56). Tentu saja dinamisasi tergantung kebutuhan entitas yang dilindungi konsep keamanan tersebut atau sering diistilahkan *referent objectnya*, sehingga variasi bentuk konsep keamanan tidak terhindarkan.

ASEAN sendiri sejatinya dapat menjadikan NATO sebagai sumber pembelajaran penting mengenai redefinisi konsep keamanan ini. Tercatat di tengah kondisi masyarakat Eropa yang berubah, dimana mereka mulai peduli dengan wacana pro lingkungan, NATO mampu mentransformasi konsep keamanannya tidak hanya mencakup ancaman militer atau teroris saja tetapi juga mengintegrasikan jenis ancaman non tradisional -secara khusus kerusakan lingkungan- ke dalam konsep keamanannya. Sebagai tindak lanjut dari proses redefinisi tersebut, NATO mengembangkan sayap baru bernama NATO CCMS yang notebene memiliki perhatian utama menanggulangi ancaman kerusakan lingkungan[[57]](#endnote-57).

Langkah NATO tersebut sebenarnya dapat menjadi bahan pertanyaan penting guna mendorong redefinisi konsep keamanan ASEAN. Apakah NATO yang mulai mengadopsi konsep kemanan non tradisional sebagaimana kecenderungan yang terjadi di ASEAN secara otomatis mengubah NATO menjadi ASEAN kedua? Tentu tidak, karena NATO mempunyai karakteristik sendiri yang hingga kini masih melekat padanya yakni persekutuan militer negara-negara pro AS. Jika AS mampu mentransformasikan dirinya tanpa mengubah identitasnya bukankah langkah sama dapat ditempuh ASEAN? Disinilah ASEAN dituntut untuk memperlihatkan “kecanggihannya” mendesain konsep kemanan yang baru dengan menintegrasikan jenis ancaman tradisional sebagai salah satu pilarnya. Tentunya poin utama yang yang harus direvisi dalam konsep ASEAN adalah *jenis ancaman* dan *cara menaggulangi ancaman tersebut*. Jika revisi tersebut dilakukan maka akan nampak perbedaan signifikan antara NATO dan ASEAN dalam *menaggulangi* jenis ancaman yang sama yakni ambisi militer negara asing. Dimana respon NATO, Pakta Warsawa, atau SEATO menekankan pada pendekatan militeristik. Disisi lain ASEAN dapat mengubahnya dengan pendekatan damai dan dialogis. Sebuah pendekatan yang menjadi ciri khas ASEAN selama ini.

1. **POST SCRIPTUM: PERAN SENTRAL INDONESIA DALAM PENCIPTAAN KEAMANAN WILAYAH ASIA TENGGARA**

Dari penjelasan diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya terjadinya kontradiksi respon ASEAN yang sangat mengesankan jika mengadapi jenis ancaman keamanan non tradisional di satu sisi namun sangat mengecewakan jika menghadapi jenis ancaman keamanan tradisional di sisi lain, disebabkan adanya titik buta pada konsepsi keamanan ASEAN. Adanya titik buta dalam konsepsi tersebut yang cenderung menjadikan ancaman keamanan tradisional sebagai hal yang tidak terfikirkan. Titik buta pada konsepsi tersebut terbukti sangat merugikan ASEAN, mengingat dalam menghadapi ancaman yang relatif terbuka saja –yakni kasus konflik laut China Selatan, ASEAN seakan tidak berkutik, tidak mampu berbuat banyak, bahkan cenderung menyerahkan urusan tersebut kepada masing-masing negara ASEAN untuk mencari solusinya. Apalagi ancaman yang lebih terselubung dari India untuk kembali menanamkan dominasinya di wilayah tersebut lewat stategi *Look East policy* nya. Tentu saja ASEAN akan semakin tidak berkutik menghadapi ancaman tersebut.

Sebagai solusi untuk membendung ancaman yang semakin membahayakan dari waktu ke waktu, artikel ini mencoba menawarkan solusi dengan ajakan/seruan untuk meredefinisi konsep keamanan ASEAN. Sebagaimana ditegaskan dalam pembahasan, konsep kemanan bukan sesuatu yang statis atau *given*. Konsepsi kemanan bersifat dinamis, dimana dapat dilakukan berbagai perubahan guna mengantisipasi ancaman-ancaman mutakhir yang mungkin membahayakan *referent object* yang dilindunginya. Dinamisasi konsep keamanan ini tentunya amat tergantung pada kelihaian penyunan konsep itu sendiri, yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab para negara anggota ASEAN. Kelihaian merancang menjadi penting untuk memastikan konsep keamanan tetap dinamis untuk menghadapi ancaman mutakhir –dalam hal ini ancaman militer dari negara asing- namun tidak menyalahi atau bertentangan dengan ideologi/prinsip dasar yang dipegang oleh ASEAN yang menitikberatkan pada solusi damai seperti dialog dan penghargaan tinggi pada keaulatan masing-masing negara. Sehingga diharapkan konsep keamanan ASEAN yang baru akan menjadi konsep keamanan yang khas ASEAN, tidak serupa dengan NATO, Pakta Warsawa, atau SEATO. Melalui redefinisi konsep kemanan pula, diharapkan negara ASEAN dapat mengatasi ancaman kemanan mutakhir tersebut secara kolektif, dikarenakan kesolidan anggota ASEAN sejatinya menjadi kunci untuk menghadapi lawan yang cukup besar –yakni India dan China-.

Sebagai penutup, artikel ini sekaligus ingin memberikan pandangan mengenai pentingnya peran yang dapat diambil Indonesia dalam mendorong redefinisi konsep kemanan ASEAN maupun dalam upaya mengaplikasikan konsep keamanan baru tersebut. Sebelumnya perlu ditegaskan bahwa ditinjau dari kepentingan nasional Indonesia sendiri, setidaknya ada dua alasan rasional saling terkait yang seharusnya mendorong Indonesia untuk tampil terdepan dalam mendorong redefinsi konsep, yakni: *pertama*, memastikan tercapainya mimpi pembangunan Indonesia yang didasarkan pada pembangunan sektor maritim di bawah rezim Jokowi. Rezim Jokowi berupaya mentransformasikan Indonesia menjadi negara besar dengan prioritas menciptakan kembali kejayaan maritim Indonesia di masa lalu. Harapannya pembangunan maritim akan memperkecil ketimpangan ekonomi antara pulau-pulau di Indonesia. Tentunya pembangunan ini dapat dilasanakan dengan baik jika ada kondisi lingkungan yang kondusif pula. Jika kondisi lingkungan tidak kondusif maka dapat dipastikan pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik. Lingkungan tidak kondusif bagi pembangunan itulah yang terjadi dengan adanya ancaman kemanan ASEAN dari ambisi politik-militer India dan China. Dapat dibayangkan jika meletus konflik di laut China Selatan, yang tentunya menggangu kestabilan kawasan termasuk Indonesia. Ancaman bagi pembangunan sangat nyata karena laut China Selatan adalah jalur laut yang mengubungkan Indonesia dan negara Asia Timur dalam hal ekspor impor[[58]](#endnote-58). Jika konflik memanas hingga terjadi perang, ekspor impor Indonesia akan terganggu yang tentunya mempengaruhi keuangan pemerintah Indonesia dalam membiayai berbagai proyek pembangunan di tanah air. Bahkan Indonesia potensial terseret perang jika China meluaskan ambisinya di laut China Selatan yang potensial merembet ke wilayah Natuna[[59]](#endnote-59). Belum lagi dengan ancaman ambisi militer India ke wilayah laut Hindia –yang menjadi pintu belakang Indonesia-. Jika India berhasil mendominasi wilayah tersebut maka pembangunan Indonesia menjadi negara maritim salah satunya dengan pembangun tol laut bukannya mempercepat pembagunan Indonesia melainkan potensial melahirkan bencana besar, karena memudahkan invasi –militer dan ekonomi- India ke Indonesia dengan tersedianya fasilitas pelabuhan yang direncanakan dibangun untuk menghubungkan berbagai wilayah Indonesia. Melihat realitas tersebut maka mau tidak mau, suka tidak suka, Indonesia di bawah rezim Jokowi harus terlibat aktif dalam meredefinsi konsep kemanan ASEAN sebagai salah satu strategi untuk memastikan keamanan kawasan ASEAN[[60]](#endnote-60).

*Kedua*, Ketiadaan konsep yang jelas mengenai bentuk politik luar negeri Indonesia dalam pemerintahan yang baru di bawah menteri Retno Marsudi. Perlu diketahui bahwa pada masa Yudhoyono dengan menteri luar negerinya Marty Natalegawa, Indonesia terkenal di dunia internasional dengan doktrin “*zero enemy, thousand friend*”[[61]](#endnote-61) ala Yudhoyono, yang diperteguh dengan doktrin Marty[[62]](#endnote-62). Doktrin “*zero enemy, thousand friend*” plus doktrin Marty memiliki titik temu yakni berupaya membangun citra positif Indonesia sebagai negara yang bersahabat, bukan ancaman bagi perdamian dunia, dan mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak[[63]](#endnote-63). Sejatinya doktrin tersebut merupakan upaya aktualisasi dari politik bebas aktif yang dianut Indonesia selama ini[[64]](#endnote-64). Berbeda dengan era Yudhoyono, di masa Jokowi dan Retno kebijakan luar negeri Indonesia coba ditransformasikan menjadi apa yang disebut “*down to earth, pro people* (membumi, pro rakyat)”[[65]](#endnote-65). Sebenarnya gagasan ini lebih dimaknai sebagai ketidakpuasan atas doktrin Yudhoyono dan Marty yang dianggap menghilangkan kepentingan nasional demi pencapaian citra positif di dunia internasional. Perubahan yang terasa dari pergantian doktrin ini misalnya Indonesia rela “mendapat citra buruk” di mata internasional dengan mengeksekusi gembong narkoba asal kewarganegaraan asing, ataupun meneggelamkan kapal-kapal nelayan asing yang berani memasuki tapal batas wilayah Indonesia tanpa izin. Akan tetapi telaah lebih mendalam menunjukkan bahwa sejatinya dua doktrin tersebut tidaklah bertentangan, bahkan dapat disinergikan secara baik, salah satunya dengan mendorong peran aktif Indonesia memperjuangkan redefinisi konsep keamanan ASEAN. Dapat dikatakan kepentingan nasional Indonesia melalui redefinisi konsep kemanan dapat tercapai, yakni dengan adanya jaminan lingkungan yang aman dan nyaman bagi berlagsungnya pembangunan nasional. Disisi lain keberhasilan Indonesia menyatukan negara ASEAN secara lebih solid dalam bidang kemanan, akan semakin mengangkat nama Indonesia di kawasan tersebut. Tidak hanya menguntungkan di level regional, peran aktif Indonesia secara otomatis akan meningkatkan presise Indonesia di mata internasional sebagai negara yang mampu berkontribusi menciptakan perdamaian di kawasan ASEAN.

Dari dua alasan rasional tersebut menunjukkan pentingnya peran aktif Indonesia dalam redefinisi keamanan ASEAN. Potensi yang dimiliki Indonesia jika berperan aktif dalam proses redefinisi sesunguhnya sangat besar. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki kapital simbolis sebagai pemimpin ASEAN, sehingga suaranya sangat dihormati sesama negara anggota ASEAN lain. Pernyataan ini tidaklah berlebihan mengingat kontribusi besar Indonesia bagi lembaga tersebut. Sebagai contoh Indonesia termasuk salah satu negara yang menginisiasi pembentukan ASEAN di tahun 1967, Indonesia berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di wilayah ASEAN seperti konflik Kamboja dengan menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting[[66]](#endnote-66). Di era kontemporer pun Indonesia kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam memediasi konflik antara Thailand dan kamboja yang terjadi di tahun 2011. Terlebih lagi Indonesia juga dikenal sebagai pemimpin intelektual ASEAN, yang terbukti dengan kemampuan Indonesia merancang prinsip ASEAN (dekenal juga dengan *ASEAN way*) yang menempatkan ide *musyawarah* dan *mufakat* sebagai pilarnya[[67]](#endnote-67). Realitas tersebut tentunya menunjukkan peran aktif Indonesia akan memudahkan redefinsi konsep kemanan ASEAN dapat diterima semua pihak di ASEAN.

Terkait dengan kontribusi Indonesia dalam aplikasi konsep keamanan baru ASEAN sejatinya tidaklah perlu diagukan. Tercatat saat ini saja, dimana konsep kemanan ASEAN belum dimodifikasi, Indonesia secara khusus telah berupaya membangun kesadaran sesama negara ASEAN untuk bersatu padu dan tidak tercerai berai dalam menghadapi konflik laut China selatan. Salah satu buktinya tercermin dari upaya lobi menteri pertahanan Indonesia Ryamizad Ryacudu saat berlangsungnya pertemuan menteri Pertahanan Asia pasifik yang dikenal dengan *Shangri-La Dialogue*. Ryacudu berhasil membujuk menteri pertahanan China untuk menerima gagasannya mengenai patroli perdamaian di kawasan laut China selatan[[68]](#endnote-68). Selain China, Ryamizad juga berhasil membujuk negara ASEAN lain agar menerima gagasan patroli perdamian tersebut[[69]](#endnote-69). Memang patroli perdamaian tidak menuntaskan masalah penetrasi China, tetapi setidaknya membuka peluang menurunkan ketegangan kawasan yang makin panas. Terlebih lagi patroli perdamaian dapat dimaknai positif sebagai cara mempererat kerjasama militer negara yang terlibat konflik. Keberhasilan lobi tersebut menujukan bukti kapasitas Indonesia dalam mengaplikasikan konsep keamanan baru ASEAN yang menekankan pada dialog dan bukan militeristik. Indonesia dapat menjadi negosiator terdepan dalam proses diskusi dan lobi dengan China ataupun India, untuk memastikan terjaganya perdamian dan keamanan di wilayah ASEAN yang coba dirusak oleh ambisi politik-militer kedua negara. Tentunya dengan keberhasilan redefinisi konsep keamanan baru ASEAN, upaya diplomasi Indonesia dapat lebih dipermudah dengan adanya dukungan penuh/solidaritas dari negara ASEAN lainnya.

REFERENCES

 Abrar, Al. (2015). *Menhan: Tiongkok Setuju Lakukan Patroli Damai di China Selatan*. Retrieved Agustus 10, 2015, from <http://internasional.metrotvnews.com/read/2015/06/03/401662/menhan-tiongkok-setuju-lakukan-patroli-damai-di-china-selatan>

Acharya, Amitav. (2012). T*he Making of Southeast Asia: International Relations of a Region*. Singapore: ISEAS

Acharya, Amitav. (2015). India’s ‘Look East’Policy. In David M. Malone, C. Raja Mohan & Srinath Raghavan. *Oxford Handbook of Indian Foreign Policy*. Oxford: Oxford University Press

Ahrens, C. Donald & Robert Henson. (2013). *Meteorology Today: An Introduction to Weather, Climate, and the Environment*. Boston: Cengage Learning

Amador III, Julio Santiago. (2009). Community Building at the Time of Nargis: The ASEAN Response. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 28, 4

Amer, Ramses & Timo Kivimaki. (2002). The Political Dimension: Sources of Conflict and Stability. In Timo Kivimäki, *War Or Peace in the South China Sea?* Copenhagen: NIAS Press

Amstrong, Charles K. (2014). An Unfinished Project: Challenges and Struggles of Korea to Become A Modern Soverign nation-State. In Jong-Chul Park & Jeong-Ho Roh, *Law and Policy on Korean Unification: Analysis and Implications*. Seoul: Korean Institute for National Unification

Andaya, Barbara Watson & Leonard Y. Andaya. (2015). A *History of Early Modern Southeast Asia 1400-1830*. Cambridge: Cambridge University Press

Antara. (n.d.). *Indonesia Prioritaskan Tiga Hal Saat Pimpin ASEAN*. Retrieved Agustus 10, 2015, from <http://www.antaranews.com/print/241559/indonesia-prioritaskan-tiga-hal-saat-pimpin-asean>

ASEAN Secretariat. (2009). *ASEAN Political-Security Community Blueprint.* Jakarta: ASEAN Secretariat

ASEAN Secretariat. (2010). *A HUMANITARIAN CALL: The Asean Response To Cyclone Nargis*. Jakarta: ASEAN Secretariat

Batabyal, Anindya. (2011). Looking East 1: South-East Asia and ASEAN. In David Scott, *Handbook of India's International Relations*. London: Routledge

Belle, Carl Vadivella. (2015). *Tragic Orphans: Indians in Malaysia*. Singapore: ISEAS

Brotodiningrat, Soemadi D.M. (2012). Perjalanan Politik Luar Negeri Republik Indonesia di Kancah Global: Sebuah Refleksi. *Jurnal Diplomasi* Vol. 4 No. 1

Brown, Oli *et.al*. (2007). *Trade, Aid and Security: An Agenda for Peace and Development*. New York: Earthscan

Caballero-Anthony, Mely & Alistair D.B. Cook. (2013). NTS Framework. In Mely Caballero-Anthony & Alistair D.B. Cook, *Non-Traditional Security in Asia: Issues, Challenges and Framework for Action*. Singapore: ISEAS

Center for a New American Security. (2013). Slipping Away? A South China Sea Code of Conduct Eludes Diplomatic Efforts. *East and South China Seas Bulletin* 11

Copper, John F. (2015). *Historical Dictionary of Taiwan (Republic of China).* Lanham: Rowman & Littlefield

Council of European Union. (2003). *A Secure Europe In A Better World European Security Strategy*. Brussels: Council of European Union

Dennehy, Kristine. (2011). Japan and Southeast Asian Regional Integration: Prime Minister Koizumi in Singapore, 2002. In Sven Saaler & Christopher W. A. Szpilman, *Pan-Asianism: A Documentary History, Volume 2: 1920–Present*. Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers

Direktorat Politik Keamanan ASEAN. (2014). KTT ASEAN pertama bagi Presiden Joko Widodo. *Masyarakat ASEAN* Edisi 6

Doidge, Mathew. (2011). The *European Union and Interregionalism: Patterns of Engagement*. England: Ashgate Publishing, Ltd

Dreyer, June Teufel. (2015). China and Its Neighbors. In Edward Friedman & Barrett L. McCormick, *What If China Doesn't Democratize?: Implications for War and Peace*. Abingdon: Routledge

Falahi, Ziyad. (2013). Memikirkan Kembali Arti Million Friends Zero Enemy dalam Era Paradox of Plenty. *Global & Strategis* Th. 7, No. 2

Gao, James Z. (2009). *Historical Dictionary of Modern China (1800-1949)*. Plymouth: Scarecrow Press, Inc

Grant, Neil. (2000). *Oxford Children's History of the World*. Oxford: Oxford University Press

Hayes, Louis D. (2015). *Political Systems of East Asia: China, Korea, and Japan*. Abingdon: Routledge

Herd, Graeme P. (2014). The “Battle of Ideas, Concept, and Geopolitical Projects” in Central Asia: Implications for Russo-Chinese Relations?. In Roger Kanet & Rémi Piet, *Shifting Priorities in Russia's Foreign and Security Policy*. England: Ashgate

Holslag, Jonathan. (2015). *China's Coming War with Asia*. Cambridge: Polity Press

Hong, Nong. (2012). *UNCLOS and Ocean Dispute Settlement: Law and Politics in the South China Sea*. Abingdon, Oxon: Routledge

ILO & ADB. (2014). *ASEAN Community 2015: Managing Integration For Better Jobs And Shared Prosperity*. Bangkok: ILO & ADB

Jain, B.M. (2006). Paracel and Spratly Island. In Thomas M. Leonard, *Encyclopedia of the Developing World Volume I*. New York: Routledge

Kesselman, Mark, Joel Krieger & William Joseph. (2013). *Introduction to Comparative Politics (Brief Edition)*. Wadsworth: Cengage Learning

Khankasayev, Mikhail & Steven Leitman. (2008). NATO/CCMS Pilot Study Meeting in Transboundary Water Management Issues in the United States & Central Asia: Problem Definition, Regulation, and Management. In John E. Moerlins *et.al,* *Transboundary Water Resources: A Foundation for Regional Stability in Central Asia*. Dordrecht: Springer

Kranrattanasuit, Naparat. (2014). *ASEAN and Human Trafficking: Case Studies of Cambodia, Thailand, and Vietnam*. Leiden: Koninklijke, Brill

Kroef, Justus M. Van der. (1976). *The Lives of SEATO*. Singapore: ISEAS

Kulke, Hermann. (2009). The Naval Expeditions of the Cholas in the Context of Asian History. In Hermann Kulke, K Kesavapany & Vijay Sakhuja, *Nagapattinam to Suvarnadwipa: Reflections on the Chola Naval Expeditions to Southeast Asia*. Singapore: ISEAS

Ladwig III, Walter C. (2009). Delhi’s Pacific Ambition: Naval Power, “Look East,” and India’s Emerging Influence in the Asia-Pacific. *Asian Security*, Vol.5, No. 2

Lal, Dinesh. (2008). *Indo-Tibet-China Conflict*. Delhi: Kalpaz Publications

Latif, Asad-ul Iqbal. (2008). From Mandalas to Microchips: The Indian Imprint on the Construction of Singapore. In K Kesavapany, A Mani & P Ramasamy, *Rising India and Indian Communities in East Asia*. Singapore: ISEAS

Liang, Shi Zong. (1998). Review and Experience of Economic Structure Reform in China. In Mohamed Osman Suliman, *China's Transition to a Socialist Market Economy*. Westport, CT: Quorum Books

Liu, Guoli. (2007). The Challenges of China’s Peaceful Development. In Joseph Y. S. Cheng, *Challenges and Policy Programmes of China's New Leadership*. Hong Kong: City University of Hong Kong Press

Meisner, Maurice. (1999). *Mao's China and After: A History of the People's Republic (Third Edition)*. New York: Free Press

Miksic, John N. (2013). *Singapore and the Silk Road of the Sea 1300-1800*. Singapore: NUS Press

Narlikar, Amrita. (2012). India and World Trade Organization. In Steve Smith, Amelia Hadfield & Tim Dunne, *Foreign Policy: Theories, Actors, Cases (Second Edition)*. Oxford: Oxford University Press

Noy, Ilan. (2014). Natural Disaster and Economic Policy for the The Pasific Rim. In Inderjit Kaur & Nirvikar Singh, *The Oxford Handbook of the Economics of the Pacific Rim*. New York: Oxford University Press

Olonisakin, Funmi. (n.d.). *Security and Sustainable Development: an African Perspective* Retrieved Agustus 10, 2015, from<http://www.unrol.org/files/Olonisakin.pdf>

Parameswaran, Prashanth. (2015). *The Trouble With Indonesia’s Foreign Policy Priorities Under Jokowi.* Retrieved Agustus 10, 2015, from <http://thediplomat.com/2015/01/the-trouble-with-indonesias-foreign-policy-priorities-under-jokowi/>

Qing, Wang. 2010. Trade and Exchange Relations Between China and the Ryukyus During the Reign of Emperor Kangxi (1662-1772). In Angela Schottenhammer, *Trading Networks in Early Modern East Asia*. Wiesbaden: Otto Harrassowitz GmbH & Co. KG

Rais, Rasul Bux. (1987). *The Indian Ocean and the Superpowers*. New Jersey: Rowman & Littlefield

Rattanasevee, Pattharapong. (2014)**.** Leadership in ASEAN: The role of Indonesia reconsidered**.** *Asian Journal of Political Science*

Redd, Forrest P. (2009). *Blood on Their Hands: How Callous Conservatives Capitalize on Clueless Constituents*. Lanham: University Press of America

Retaduari, Elza Astari. (2015). *Cerita Menhan yang Berhasil 'Merayu' Tiongkok Soal Laut China Selatan*. Retrieved Agustus 10, 2015, from [http://news.detik.com/berita/2933752/cerita-menhan-yang-berhasil-merayu-tiongkok-soal-laut-china-selatan pada 15 Agustus 2015](http://news.detik.com/berita/2933752/cerita-menhan-yang-berhasil-merayu-tiongkok-soal-laut-china-selatan%20pada%2015%20Agustus%202015)

Ricards, Michael P. (2000). *The Presidency and the Middle Kingdom: China, the United States, and the Executive Leadership*. Lanham: Leington Books

Roberts, Christopher B. (2015). ASEAN: The Challenge of Unity in Diversity. Dalam Leszek Buszynski & Christopher B. Roberts (ed). *The South China Sea Maritime Dispute: Political, Legal and Regional Perspectives*. Abingdon, Oxon: Routledge

Shekhar, Vibhanshu. (2015). *Indonesia's Rise: Seeking Regional and Global Roles*. New Delhi: Pentagon Press

Stich, Rodney. (2005). *Iraq, Lies, Cover-Ups, and Consequences As Revealed by Former Government Agents*. Alamo, CA: Silverpeak Enterprises, Inc

Syamsir, Evy R. (2014). *China Klaim Wilayah Natuna*. Retrieved Agustus 10, 2015, from <http://www.antaranews.com/berita/423685/china-klaim-wilayah-natuna>

Swanström, Niklas. 2010. Traditional and Non-Traditional Security Threats in Central Asia: Connecting the New and the Old. *China and Eurasia Forum Quarterly*, Volume 8, No. 2

Tamura, Eileen *et.al*. (1997). *China: Understanding Its Past*. Honolulu: University of Hawai’i Press

Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah. (n.d.). *What Does Jokowi’s “Pro-People Diplomacy” Mean for ASEAN?* Retrieved Agustus 10, 2015, from <http://asc.fisipol.ugm.ac.id/jokowis-pro-people-diplomacy-means-asean/>

Vernygora, Vlad, Natalia Chabad & Chae-Deug Yi. (2012). Mirroring The EU? Functional Capacity Of Integration In Asia. *TRAMES*, 16(66/61)

Wang, Enbao. (2014). Deng’s Reform: Thory and Practice. In Xiaobing Li, Xiansheng Tian, *Evolution of Power: China's Struggle, Survival, and Success*. Lanham: Lexington Books

Wang, Vincent Wei-Chen. (2005). The Logic of China-ASEAN FTA: Economic Statecraft of “Peaceful Ascendancy”. In Ho Khai Leong & Samuel C Y Ku, *China and Southeast Asia: Global Changes and Regional Challenges*. Singapore: ISEAS

Wenhua, Shan. (2008). Redefining the Chinese concept of Sovereignty. In Wang Gungwu & Zheng Yongnian, *China and the New International Order*. Abingdon: Routledge

Wijaya, Indra. (2015). *FEATURE: Dua Skenario Indonesia di Laut Cina Selatan*. Retrieved Agustus 10, 2015, from <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/08/04/078689002/feature-dua-skenario-indonesia-di-laut-cina-selatan/3>

Xiang, Lanxin. (2009). There Is No Such Thing As A Normative Chinese Model. In Michael Emerson, *Readings in European Security Volume 5*. Brussels: Center for European Policy Studies

Zhang, Xiaoming. (2014). China’s Relations With Its Neighboring Countries: Historical Patterns And The Formation Of Regional Community. In Yong Wook Lee & Key-young Son, *China’s Rise and Regional Integration in East Asia: Hegemony Or Community?* Abingdon: Routledge

Zheng, Bang Quan. (2006). A Rising China: Catalysts for Chinese Military Modernization. In Sujian Guo, *China's "peaceful Rise" in the 21st Century: Domestic and International Conditions*. England: Ashgate

1. Lebih jauh mengenai pengaruh Uni Eropa terhadap upaya penciptaan ASEAN community dapat dilacak hingga tahun 1980an. Dimana telah terjalin relasi serius antara ASEAN dan European community (EU) –cikal bakal EU-. Lihat Vernygora, Vlad, Natalia Chabad & Chae-Deug Yi. (2012). Mirroring The EU? Functional Capacity Of Integration In Asia. *TRAMES*, 16(66/61),hlm. 48-49. Lihat pula Doidge, Mathew. (2011). The *European Union and Interregionalism: Patterns of Engagement*. England: Ashgate Publishing, Ltd,hlm. 95 [↑](#endnote-ref-1)
2. ILO & ADB. (2014). *ASEAN Community 2015: Managing Integration For Better Jobs And Shared Prosperity*. Bangkok: ILO & ADB,hlm.iii,xi [↑](#endnote-ref-2)
3. Olonisakin, Funmi. (n.d.). *Security and Sustainable Development: an African Perspective* Retrieved Agustus 10, 2015, fromhttp://www.unrol.org/files/Olonisakin.pdf. Lihat pula Council of European Union. (2003). *A Secure Europe In A Better World European Security Strategy*. Brussels: Council of European Union,hlm. 2; Brown, Oli *et.al*. (2007). *Trade, Aid and Security: An Agenda for Peace and Development*. New York: Earthscan,hlm. 192 [↑](#endnote-ref-3)
4. Ancaman keamanan non tradisional sendiri dapat dimaknai kepada ancaman yang tergolong non militer. Berbeda dengan ancaman keamanan tradisional yang didominasi ancaman militer -secara khsusus ancaman militer dari negara asing-. Diantara bentuk ancaman keamanan non tradisional ini misalnya: bencana alam, perubahan iklim, obat-obatan terlarang dan perdagangan manusia. Lihat Swanström, Niklas. 2010. Traditional and Non-Traditional Security Threats in Central Asia: Connecting the New and the Old. *China and Eurasia Forum Quarterly*, Volume 8, No. 2, hlm. 38; Kranrattanasuit, Naparat. (2014). *ASEAN and Human Trafficking: Case Studies of Cambodia, Thailand, and Vietnam*. Leiden: Koninklijke, Brill,hlm. 38-39; Caballero-Anthony, Mely & Alistair D.B. Cook. (2013). NTS Framework. In Mely Caballero-Anthony & Alistair D.B. Cook, *Non-Traditional Security in Asia: Issues, Challenges and Framework for Action*. Singapore: ISEAS,hlm.1 [↑](#endnote-ref-4)
5. Noy, Ilan. (2014). Natural Disaster and Economic Policy for the The Pasific Rim. In Inderjit Kaur & Nirvikar Singh, The Oxford Handbook of the Economics of the Pacific Rim. New York: Oxford University Press,hlm. 89; Ahrens, C. Donald & Robert Henson. (2013). *Meteorology Today: An Introduction to Weather, Climate, and the Environment*. Boston: Cengage Learning,hlm. 463 [↑](#endnote-ref-5)
6. Amador III, Julio Santiago. (2009). Community Building at the Time of Nargis: The ASEAN Response. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 28, 4,hlm. 7 [↑](#endnote-ref-6)
7. *Ibid*,hlm.8 [↑](#endnote-ref-7)
8. Dalam rilis resmi ASEAN sendiri, ASEAN menjadikan kasus Myamnar sebagai bukti kongkrit ASEAN mampu menjadi lembaga yang kapabel dalam mensinergikan berbagai aktor lokal, regional, dan internasional dalam aksi humanitarian ke Myamnar. Lihat ASEAN Secretariat. (2010). *A HUMANITARIAN CALL: The Asean Response To Cyclone Nargis*. Jakarta: ASEAN Secretariat,hlm. 14-16 [↑](#endnote-ref-8)
9. Semua penyebutan China dalam artikel ini merujuk pada negara Republik Rakyat China. Bukan termasuk Taiwan. [↑](#endnote-ref-9)
10. Dalam dokumen resmi *ASEAN Political Security Community*, deklarasi tersebut dianggap sebagai salah satu norma penting yang berhasil ditegakkan oleh ASEAN. Lihat ASEAN Secretariat. (2009). *ASEAN Political-Security Community Blueprint.* Jakarta: ASEAN Secretariat,hlm. 6-7 [↑](#endnote-ref-10)
11. Lihat Center for a New American Security. (2013). Slipping Away? A South China Sea Code of Conduct Eludes Diplomatic Efforts. *East and South China Seas Bulletin* 11,hlm. 1. Secara ungkapan asli, Pitsuwan melalukan kekeliruan ucap karena menyatakan laut China selatan dapat menjadi palestina bagi Asia sebagaimana Palestina bagi Timur Tengah. Padahal Timur Tengah itu bagian dari Asia juga. Sehingga lebih tepat laut China selatan sebagai “Palestina baru/Palestina kedua” di Asia. [↑](#endnote-ref-11)
12. Hong, Nong. (2012). *UNCLOS and Ocean Dispute Settlement: Law and Politics in the South China Sea*. Abingdon, Oxon: Routledge,hlm. 193 [↑](#endnote-ref-12)
13. Roberts, Christopher B. (2015). ASEAN: The Challenge of Unity in Diversity. Dalam Leszek Buszynski & Christopher B. Roberts (ed). *The South China Sea Maritime Dispute: Political, Legal and Regional Perspectives*. Abingdon, Oxon: Routledge,hlm. 138; Holslag, Jonathan. (2015). *China's Coming War with Asia*. Cambridge: Polity Press,hlm. 87 [↑](#endnote-ref-13)
14. Deng sendiri memilih menggunakan istilah sistem ekonomi pasar sosialis (*socialist market economy system*). Istilah ini dipilih sebagai upaya memadukan gagasan pasar dengan ideologi komunis yang dijadikan pijakan resmi China sejak Mao. Lihat Liang, Shi Zong. (1998). Review and Experience of Economic Structure Reform in China. In Mohamed Osman Suliman, *China's Transition to a Socialist Market Economy*. Westport, CT: Quorum Books,hlm. 6. Lihat pula penjelasan terperinci mengenai doktrin Deng tentang model ekonomi ini dalam Wang, Enbao. (2014). Deng’s Reform: Thory and Practice. In Xiaobing Li, Xiansheng Tian, *Evolution of Power: China's Struggle, Survival, and Success*. Lanham: Lexington Books,hlm. 107-111 [↑](#endnote-ref-14)
15. Kemajuan ekonomi China bahkan disebut sebagai salah satu keajaiban ekonomi paling besar di abad 20. Lihat Kesselman, Mark, Joel Krieger & William Joseph. (2013). *Introduction to Comparative Politics (Brief Edition)*. Wadsworth: Cengage Learning,hlm. 382 [↑](#endnote-ref-15)
16. Zheng, Bang Quan. (2006). A Rising China: Catalysts for Chinese Military Modernization. In Sujian Guo, *China's "peaceful Rise" in the 21st Century: Domestic and International Conditions*. England: Ashgate,hlm. 183 [↑](#endnote-ref-16)
17. Lihat contoh kebohongan AS dalam membenarkan invasinya ke Iraq di tahun 2003 beserta sejumlah bantahannya di Stich, Rodney. (2005). *Iraq, Lies, Cover-Ups, and Consequences As Revealed by Former Government Agents*. Alamo, CA: Silverpeak Enterprises, Inc,hlm. 115-216. Lihat pula Redd, Forrest P. (2009). *Blood on Their Hands: How Callous Conservatives Capitalize on Clueless Constituents*. Lanham: University Press of America,hlm. 27-28 [↑](#endnote-ref-17)
18. China mengusung doktrin “*peaceful rise (heping zueqi)*” sebagai identitas barunya. Konsep ini memberi arti bahwa pertumbuhan/kebangkitan China tidak akan menjadi ancaman bagi tetangganya/ bangsa lain. Konsep ini pertama kali disuarakan di tahun 2003 oleh pejabat tinggi China bernama Zheng Bijian. Sejak dicetuskan oleh Bijian, doktrin tersebut semakin populer paska dipergunakan oleh Wen Jaibao –yang saat itu menjabat sebagai perdana menteri China- saat berpidato di Harvard di tahun yang sama. Lihat Liu, Guoli. (2007). The Challenges of China’s Peaceful Development. In Joseph Y. S. Cheng, *Challenges and Policy Programmes of China's New Leadership*. Hong Kong: City University of Hong Kong Press,hlm. 262-263 [↑](#endnote-ref-18)
19. Penggunaan istilah Sinosentrisme atau secara lengkap *Sino-centric tributary system* untuk menggambarkan tata dunia ala China dipopulerkan oleh John K. Fairbank, seorang akademisi Harvard di tahun 1960an. Lihat Amstrong, Charles K. (2014). An Unfinished Project: Challenges and Struggles of Korea to Become A Modern Soverign nation-State. In Jong-Chul Park & Jeong-Ho Roh, *Law and Policy on Korean Unification: Analysis and Implications*. Seoul: Korean Institute for National Unification,hlm. 64 [↑](#endnote-ref-19)
20. Gao, James Z. (2009). *Historical Dictionary of Modern China (1800-1949)*. Plymouth: Scarecrow Press, Inc,hlm.329 [↑](#endnote-ref-20)
21. Pentingnya hubungan dagang negara subordinat dengan China mungkin dapat disamakan dengan hubungan dagang antara Arab dan Eropa di masa lampau (pra kolonial). Eropa menggantungkan hubungan dagang dengan Arab untuk mendapatkan berbagai komoditi yang dibutuhkan Eropa seperti Sutra dan rempah. Hubungan dagang ini sempat mengalami kendala saat Kesultanan Utsmaniyyah (Ottoman) menutup sejumlah jalur perdagangan ke Eropa. Akibatnya bangsa Eropa mengalami masalah serius dan akhirnya memicu penjelajahan samudra untuk menemukan komoditas yang mereka idamkan secara mandiri. Lihat Grant, Neil. (2000). *Oxford Children's History of the World*. Oxford: Oxford University Press,hlm. 72

Kasus tersebut nampaknya cukup menggambarkan kondisi perdagangan negara subordinat dan China. Jika negara subordinat memilih melawan China maka ancaman pemutusan perdagangan dapat dilakukan setiap saat. Dan tentunya dampaknya sangat merugikan bagi negara subordinat. [↑](#endnote-ref-21)
22. Jaminan keamanan dalam bentuk perlindungan jika negara tersebut diserang oleh bangsa asing [↑](#endnote-ref-22)
23. Tamura, Eileen *et.al*. (1997). *China: Understanding Its Past*. Honolulu: University of Hawai’i Press,hlm. 79; Qing, Wang. 2010. Trade and Exchange Relations Between China and the Ryukyus During the Reign of Emperor Kangxi (1662-1772). In Angela Schottenhammer, *Trading Networks in Early Modern East Asia*. Wiesbaden: Otto Harrassowitz GmbH & Co. KG,hlm. 186-187 [↑](#endnote-ref-23)
24. Hayes, Louis D. (2015). *Political Systems of East Asia: China, Korea, and Japan*. Abingdon: Routledge,hlm. 87 [↑](#endnote-ref-24)
25. Stategi untuk mengemas kolonialisme Barat dengan wacana-wacana mulia seperti Barat datang bukan untuk menjajah atau mengekpoitasi negara jajahan, tetapi untuk menolong mereka. Dengan kata lain Barat datang untuk “memberadabkan” bangsa yang “tidak beradab” [↑](#endnote-ref-25)
26. Diperkirakan konsepsi ini sudah muncul sekitar 2000 tahun yang lalu. Lihat Zhang, Xiaoming. (2014). China’s Relations With Its Neighboring Countries: Historical Patterns And The Formation Of Regional Community. In Yong Wook Lee & Key-young Son, *China’s Rise and Regional Integration in East Asia: Hegemony Or Community?* Abingdon: Routledge,hlm. 145 [↑](#endnote-ref-26)
27. *Ibid*,hlm. 145; Wenhua, Shan. (2008). Redefining the Chinese concept of Sovereignty. In Wang Gungwu & Zheng Yongnian, *China and the New International Order*. Abingdon: Routledge,hlm. 57 [↑](#endnote-ref-27)
28. Pernyataan ini sangatlah beralasan mengingat bangsa China adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya sehingga sering dijuluki *history minded people*. Terlebih lagi sejak awal pendirian China modern di bawah Mao, konsep keamanan negara tersebut sudah dipengaruhi oleh tradisi lama. Lihat Xiang, Lanxin. (2009). There Is No Such Thing As A Normative Chinese Model. In Michael Emerson, *Readings in European Security Volume 5*. Brussels: Center for European Policy Studies,hlm. 158; Wang, Vincent Wei-Chen. (2005). The Logic of China-ASEAN FTA: Economic Statecraft of “Peaceful Ascendancy”. In Ho Khai Leong & Samuel C Y Ku, *China and Southeast Asia: Global Changes and Regional Challenges*. Singapore: ISEAS,hlm. 37 [↑](#endnote-ref-28)
29. Asia tengah relatif lemah dibandingkan dengan China. Negara di wilayah tersebut sebelumnya merupakan bagian tak terpisahkan dari Soviet dan baru mendapatkan kemerdekannya –yang semu- di tahun 1991. [↑](#endnote-ref-29)
30. Hubungan yang terbentuk ialah China mendapatkan “upeti” berupa bahan-bahan mentah untuk industrinya, sebagai timbal balik China memberikan pengakuan atas teritorial modern negara tersebut beserta rezim yang memegang tampuk kekuasaan di wilayah tersebut. Lihat Herd, Graeme P. (2014). The “Battle of Ideas, Concept, and Geopolitical Projects” in Central Asia: Implications for Russo-Chinese Relations?. In Roger Kanet & Rémi Piet, *Shifting Priorities in Russia's Foreign and Security Policy*. England: Ashgate,hlm. 198 [↑](#endnote-ref-30)
31. Klaim China atas Tibet didasarkan sejarah wilayah tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dinasti China di masa lalu. Lihat Meisner, Maurice. (1999). *Mao's China and After: A History of the People's Republic (Third Edition)*. New York: Free Press,hlm. 65; Lal, Dinesh. (2008). *Indo-Tibet-China Conflict*. Delhi: Kalpaz Publications,hlm. 60 [↑](#endnote-ref-31)
32. Ricards, Michael P. (2000). *The Presidency and the Middle Kingdom: China, the United States, and the Executive Leadership*. Lanham: Leington Books,hlm. 132 [↑](#endnote-ref-32)
33. Copper, John F. (2015). *Historical Dictionary of Taiwan (Republic of China).* Lanham: Rowman & Littlefield,hlm. 129 [↑](#endnote-ref-33)
34. Salah satu wilayah yang diklaim China sebagai bagian dari negara tersebut adalah Natuna –wilayah Indonesia- . Meskipun hingga kini China belum memproklamirkannya secara resmi. Ali Alatas yang saat itu menjabat sebagai menteri luar negeri pernah mengunjungi Beijing dan menanyakan sikap China tentang wilayah Natuna. Menurut Alatas, China tidak menyatakan secara eksplisit tentang klaimnya, hanya berputar-putar menbicarakan Natuna sebagai warisan sejarah China, termasuk menyebut-nyebut Dinasti China di masa lalu. Jika memperhatikan konsep Sinosentris yang dibahas dalam artikel ini, retorika China kepada Alatas sesungguhnya menunjukkan klaim China atas Natuna. Hanya saja mungkin China masih mempertimbangkan berbagai kemungkinan jika mengklaim Natuta dalam waktu dekat. Lihat Dreyer, June Teufel. (2015). China and Its Neighbors. In Edward Friedman & Barrett L. McCormick, *What If China Doesn't Democratize?: Implications for War and Peace*. Abingdon: Routledge,hlm. 174 [↑](#endnote-ref-34)
35. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus Vietnam. China yang mengklaim kepemilikan pulau Paracel sebagai bagian dari dinasti China di masa lalu. Tercatat di tahun 1974 China melakukan akeksasi paksa wilayah tersebut dari tangan Vietnam dengan kekuatan militernya. Paska Aneksasi di tahun 1997 China membuka pulau tersebut untuk turis, sebagai salah satu destinasi wisata negara tersebut. Selain pembukaan untuk turis, China semakin menancapkan kukunya dengan mengirimkan pasukannya di pulau tersebut sebagai pertanda bahwa wilayah tersebut adalah miliknya yang sah di tahun 2003. Lihat Jain, B.M. (2006). Paracel and Spratly Island. In Thomas M. Leonard, *Encyclopedia of the Developing World Volume I*. New York: Routledge,hlm. 1241 [↑](#endnote-ref-35)
36. Narlikar, Amrita. (2012). India and World Trade Organization. In Steve Smith, Amelia Hadfield & Tim Dunne, *Foreign Policy: Theories, Actors, Cases (Second Edition)*. Oxford: Oxford University Press,hlm. 348-349 [↑](#endnote-ref-36)
37. Acharya, Amitav. (2015). India’s ‘Look East’Policy. In David M. Malone, C. Raja Mohan & Srinath Raghavan. *Oxford Handbook of Indian Foreign Policy*. Oxford: Oxford University Press,hlm.456 [↑](#endnote-ref-37)
38. *Ibid*,hlm. 457 [↑](#endnote-ref-38)
39. Batabyal, Anindya. (2011). Looking East 1: South-East Asia and ASEAN. In David Scott, *Handbook of India's International Relations*. London: Routledge,hlm. 137 [↑](#endnote-ref-39)
40. Ladwig III, Walter C. (2009). Delhi’s Pacific Ambition: Naval Power, “Look East,” and India’s Emerging Influence in the Asia-Pacific. *Asian Security*, Vol.5, No. 2, hlm. 12 [↑](#endnote-ref-40)
41. Latif, Asad-ul Iqbal. (2008). From Mandalas to Microchips: The Indian Imprint on the Construction of Singapore. In K Kesavapany, A Mani & P Ramasamy, *Rising India and Indian Communities in East Asia*. Singapore: ISEAS,hlm. 549; Andaya, Barbara Watson & Leonard Y. Andaya. (2015). A *History of Early Modern Southeast Asia 1400-1830*. Cambridge: Cambridge University Press,hlm. 43 [↑](#endnote-ref-41)
42. Miksic, John N. (2013). *Singapore and the Silk Road of the Sea 1300-1800*. Singapore: NUS Press,hlm. 106 [↑](#endnote-ref-42)
43. *Ibid* [↑](#endnote-ref-43)
44. Salah satu tokoh yang diperkirakan sebagai intelejen Chola ialah duta negara tersebut yang akan berlayar ke China. Duta tersebut sempat berlabuh di Sriwijaya. Diperkirakan selama melakukan pendaratan di Sriwijaya ia mengumpulkan data-data penting mengenai Sriwijaya dan melaporkannya ke kerajaan Chola paska selesai melaksanakan misi ke China. Lihat Kulke, Hermann. (2009). The Naval Expeditions of the Cholas in the Context of Asian History. In Hermann Kulke, K Kesavapany & Vijay Sakhuja, *Nagapattinam to Suvarnadwipa: Reflections on the Chola Naval Expeditions to Southeast Asia*. Singapore: ISEAS,hlm. 8 [↑](#endnote-ref-44)
45. Belle, Carl Vadivella. (2015). *Tragic Orphans: Indians in Malaysia*. Singapore: ISEAS,hlm. 5; Rais, Rasul Bux. (1987). *The Indian Ocean and the Superpowers*. New Jersey: Rowman & Littlefield,hlm. 16-17 [↑](#endnote-ref-45)
46. Sejarah membuktikan hal ini, dimana India pernah memilih menyatakan dukungannya kepada pemimpin boneka Vietnam yang memerintah Kamboja. Sikap ini berlawanan dengan ASEAN yang menginginkan Vietnam mundur dari Kamboja karena bertentangan dengan prinsip non intervensi dan menghargai kedaulatan masing-masing negara. Lihat Acharya, Amitav. (2015). India’s ‘Look East’Policy. In David M. Malone, C. Raja Mohan & Srinath Raghavan. *Oxford Handbook of Indian Foreign Policy*. Oxford: Oxford University Press,hlm. 456-457.

Sikap India sejatinya dapat dimaklumi mengingat relasi China dan Vietnam bersifat antagonis. India tentunya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dengan memberi dukungan pada Vietnam. [↑](#endnote-ref-46)
47. Pembangunan ASEAN sendiri merupakan bentuk resistensi dari adanya dua blok raksasa dunia. Lihat Dennehy, Kristine. (2011). Japan and Southeast Asian Regional Integration: Prime Minister Koizumi in Singapore, 2002. In Sven Saaler & Christopher W. A. Szpilman, *Pan-Asianism: A Documentary History, Volume 2: 1920–Present*. Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers,hlm. 348 [↑](#endnote-ref-47)
48. Trauma Negara ASEAN akan SEATO tercermin dari ASEAN Summit yang diselenggarakan di Bali pada tahun 1967 yang menolak upaya “SEATO-nisasi” ASEAN. Lihat Kroef, Justus M. Van der. (1976). *The Lives of SEATO*. Singapore: ISEAS,hlm. 3

Sikap tersebut jelas menunjukkan rasa benci ASEAN terhadap keberadaan lembaga sejenis SEATO. [↑](#endnote-ref-48)
49. Salah satunya tergambar dari pernyataan bersama delegasi Indonesia dan Malaysia saat pertemuan menteri luar negeri ASEAN di Singapura pada tahun 1977 yang menegaskan ancaman utama bagi kemanan ASEAN berasal dari tindakan subversif. Senada dengan Malaysia dan Indonesia, Thailand juga menyatakan ASEAN tidak akan bertransformasi menjadi persekutuan militer. Lihat Acharya, Amitav. (2012). T*he Making of Southeast Asia: International Relations of a Region*. Singapore: ISEAS,hlm. 168-169 [↑](#endnote-ref-49)
50. Konflik perbatasan antar Negara ASEAN telah terjadi sejak lembaga regional tersebut berdiri. Sejumlah perkembangan positif berhasil dicapai antar negara yang bertikai dengan duduk bersama dan berakhir dengan kesepakatan antar pihak yang bertikai. Diantara contoh keberhasilan ini dapat disimak di Amer, Ramses & Timo Kivimaki. (2002). The Political Dimension: Sources of Conflict and Stability. In Timo Kivimäki, *War Or Peace in the South China Sea?* Copenhagen: NIAS Press,hlm. 101-102 [↑](#endnote-ref-50)
51. Shekhar, Vibhanshu. (2015). *Indonesia's Rise: Seeking Regional and Global Roles*. New Delhi: Pentagon Press,hlm.87 [↑](#endnote-ref-51)
52. Asuminya jika dipandang dari negara ASEAN secara indiviudal, konflik yang terjadi diantara negara anggota ASEAN dapat digolongkan sebagai jenis ancaman kemanan tradisional. Namun sebenarnya kurang tepat jika menggolongkan konflik tersebut sebagai jenis ancaman kemanan tradisional jika dipandang dari ASEAN secara kelembagaan. Contoh mudahnya musuh NATO sangat jelas yakni negara di luar NATO, terkhusus yang tergabung dalam Pakta Warsawa (outward looking). Ketika misal ada kasus negara anggota NATO seperti Inggris dan Perancis bertikai tentunya tidak tergolong ancaman kemanan tradisional dalam kacamata NATO. [↑](#endnote-ref-52)
53. Perubahan disebabkan adanya ancaman mutakhir yang sebelumnya tidak terdefinsisikan [↑](#endnote-ref-53)
54. Jenis ancaman keamanan yang sangat kontekstual dengan keadaan dunia ketiga [↑](#endnote-ref-54)
55. Dikarenakan sumber ancamannya kekuatan militer negara lain [↑](#endnote-ref-55)
56. Misal sumber ancamannnya adalah kemiskinan, tidak mungkin ditangani dengan militer. [↑](#endnote-ref-56)
57. Khankasayev, Mikhail & Steven Leitman. (2008). NATO/CCMS Pilot Study Meeting in Transboundary Water Management Issues in the United States & Central Asia: Problem Definition, Regulation, and Management. In John E. Moerlins *et.al,* *Transboundary Water Resources: A Foundation for Regional Stability in Central Asia*. Dordrecht: Springer,hlm. 66 [↑](#endnote-ref-57)
58. Wijaya, Indra. (2015). *FEATURE: Dua Skenario Indonesia di Laut Cina Selatan*. Retrieved Agustus 10, 2015, from <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/08/04/078689002/feature-dua-skenario-indonesia-di-laut-cina-selatan/3> [↑](#endnote-ref-58)
59. Syamsir, Evy R. (2014). *China Klaim Wilayah Natuna*. Retrieved Agustus 10, 2015, from <http://www.antaranews.com/berita/423685/china-klaim-wilayah-natuna> [↑](#endnote-ref-59)
60. Presiden Jokowi sendiri sejatinya sadar akan keterkaitan erat pembangunan nasional Indonesia dengan persoalan keamanan di wilayah Asia Tenggara. Dimana Jokowi menegaskan keterkaitan tersebut dalam KTT ASEAN pada 12 November 2014 di Myanmar. Jokowi juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk terlibat aktif dalam menjaga keamanan di wilayah Asia Tenggara. Lihat Direktorat Politik Keamanan ASEAN. 2014. KTT ASEAN pertama bagi Presiden Joko Widodo. Dalam *Masyarakat ASEAN* Edisi 6,hlm. 4 Tentunya peran aktif Indonesia bisa dilakukan secara nyata salah satunya dengan mendorong redefinisi keamanan ASEAN. [↑](#endnote-ref-60)
61. Disebutkan pada paruh kedua kekuasaanya, Yudhoyono mengganti istilah tersebut menjadi “*zero enemy, millions friend*”, yang pada hakikatnya sama, namun dengan nuansa yang lebih mabisius. [↑](#endnote-ref-61)
62. Doktrin Marty dikenal juga dengan istilah *Dynamic Equirilibium*. Pokok dari doktrin tersebut bertumpu pada dua hal yakni *pertama*, anti dominasi, dan *kedua*, simbiosis mutualisme. Bagi Marty hubungan antar negara yang diimajinasikan Indonesia haruslah bersiat saling menguntungkan kedua belah pihak. Tentunya untuk memastikan terjadinya kesetaraan hubungan haruslah didorong kesetaraan antar pihak yang berelasi. Adanya kekuatan dominan potensial menjadikan relasi mutualisme sulit terjadi, akibat ambisi kuasa salah satu pihak yang dominan. Lihat lebih lanjut mengenai doktrin Marty di: Brotodiningrat, Soemadi D.M. (2012). Perjalanan Politik Luar Negeri Republik Indonesia di Kancah Global: Sebuah Refleksi. *Jurnal Diplomasi* Vol. 4 No. 1,hlm. 15; Antara. (n.d.). *Indonesia Prioritaskan Tiga Hal Saat Pimpin ASEAN*. Retrieved Agustus 10, 2015, from <http://www.antaranews.com/print/241559/indonesia-prioritaskan-tiga-hal-saat-pimpin-asean> [↑](#endnote-ref-62)
63. Falahi, Ziyad. (2013). Memikirkan Kembali Arti Million Friends Zero Enemy dalam Era Paradox of Plenty. *Global & Strategis* Th. 7, No. 2,hlm. 228-229 [↑](#endnote-ref-63)
64. Doktin ini sejatinya mencerminkan respon Indonesia atas kondisi politik internasional pada saat itu yang diceminkan dengan kecenderungan pembelahan ke arah yang sama sebagaimana perang dingin. Bedanya pembelahan terjadi dalam bentuk lain –bukan dalam polarisasi Soviet&AS-, misal: dunia Islam dan Barat pasca 9/11, negara utara dan selatan dalam persoalan perubahan iklim, negara utara dan selatan dalam permasalahan ekonomi. Indonesia nempaknya ingin menjadi “jembatan” yang mampu menyatukan dunia yang terpecah dengan cara-cara yang dialogis/damai, bukan militer atau konfrontasi radikal. [↑](#endnote-ref-64)
65. Parameswaran, Prashanth. (2015). *The Trouble With Indonesia’s Foreign Policy Priorities Under Jokowi.* Retrieved Agustus 10, 2015, from <http://thediplomat.com/2015/01/the-trouble-with-indonesias-foreign-policy-priorities-under-jokowi/>; Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah. (n.d.). *What Does Jokowi’s “Pro-People Diplomacy” Mean for ASEAN?* Retrieved Agustus 10, 2015, from <http://asc.fisipol.ugm.ac.id/jokowis-pro-people-diplomacy-means-asean/> [↑](#endnote-ref-65)
66. Rattanasevee, Pattharapong. (2014)**.** Leadership in ASEAN: The role of Indonesia reconsidered**.** *Asian Journal of Political Science*,hlm. 5; Shekhar, Vibhanshu. (2015). *Indonesia's Rise: Seeking Regional and Global Roles*. New Delhi: Pentagon Press,hlm.85 [↑](#endnote-ref-66)
67. *Ibid* [↑](#endnote-ref-67)
68. Retaduari, Elza Astari. (2015). *Cerita Menhan yang Berhasil 'Merayu' Tiongkok Soal Laut China Selatan*. Retrieved Agustus 10, 2015, from [http://news.detik.com/berita/2933752/cerita-menhan-yang-berhasil-merayu-tiongkok-soal-laut-china-selatan pada 15 Agustus 2015](http://news.detik.com/berita/2933752/cerita-menhan-yang-berhasil-merayu-tiongkok-soal-laut-china-selatan%20pada%2015%20Agustus%202015); Abrar, Al. (2015). *Menhan: Tiongkok Setuju Lakukan Patroli Damai di China Selatan*. Retrieved Agustus 10, 2015, from <http://internasional.metrotvnews.com/read/2015/06/03/401662/menhan-tiongkok-setuju-lakukan-patroli-damai-di-china-selatan> [↑](#endnote-ref-68)
69. Wijaya, Indra. (2015). *FEATURE: Dua Skenario Indonesia di Laut Cina Selatan*. Retrieved Agustus 10, 2015, from <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/08/04/078689002/feature-dua-skenario-indonesia-di-laut-cina-selatan/3> [↑](#endnote-ref-69)